BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu 2024 merupakan perayaan demokrasi bangsa Indonesia dan bagian dari agenda politik yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemungutan suara pemilu 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, dan antusiasme masyarakat Indonesia dalam menyambut pemilu terlihat jelas. Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi dan memberikan masyarakat kesempatan untuk memilih pemimpin nasional dan wakil rakyat. Pemilu dapat dikatakan sebagai salah satu alat rakyat dalam demokrasi untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan bertanggung jawab mensejahterakan rakyat. Partisipasi politik rakyat dalam pemilu di negara demokratis menunjukkan pelaksanaan kekuasaan negara tertinggi yang sah, atau kedaulatan rakyat, oleh rakyat. Konstitusi menekankan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagi presiden, wakil presiden, dan Kongres, pemilu kali ini sebaiknya dimaknai sebagai penyerahan amanah dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan tertinggi dalam negara.

Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum dilakukan oleh seluruh warga Indonesia yang memiliki hak suara, (Wardhani, 2018:59) Pengkategorian kelompok pemilihnya dimana terdapat ketertarikan diteliti dan diamati semakin dalam yakni pemilih pemulanya atau kaum muda, pemilih pemuda merupakan pemilih dimana pertama sekali menggunakan hak suara mereka dipemilu.

Pemilihan umum dapat dianggap sebagai sarana demokrasi, suatu bentuk ekspresi kedaulatan rakyat untuk melatih wakil-wakil dan pemimpin yang mempunyai ambisi, kualifikasi dan tanggung jawab untuk kemaslahatan rakyat. Salah satu jenis kelompok pemilih yang menarik untuk dicermati dan dikaji lebih lanjut adalah kelompok pemilih pemula. Partisipasi politik pemilih pemula sangat penting untuk diperhatikan, karena pemilih pemula adalah generasi penerus bangsa, yang akan menentukan masa depan tanah air. Kuatnya partisipasi politik pemilih pemula akan menunjukkan bahwa generasi muda mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk turut serta membangun negara

Berdasarkan UUD NRI Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Adapun berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 1 tentang Pemilu ditegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat (Rahmaniah, 2021:1-2)

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (*golput*) dalam pemilu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan penertahanan dari kedaulatan rakyat.

Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (*golput*) dalam pemilu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi

merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dari kedaulatan rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan pemilu. Memang tanpa partisipasi masyarakat dan partisipasi masyarakat sebagai pemilih, maka pemilu tidak mempunyai kedaulatan. Ukuran partisipasi ini tidak hanya mengacu pada kehadiran pemilih pada saat memilih di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara, namun juga pada partisipasi pemilih sepanjang tahapan pemungutan suara. Masyarakat juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan acara demokrasi seperti pemilihan umum. Oleh karena itu, masyarakat dan pemilu merupakan satu kesatuan yang utuh, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemilu karena masyarakat merupakan unsur utama dan penentu hasil pemilu. Indonesia adalah negara demokrasi dan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sebab, rakyatlah yang berhak menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Pemilihan dan pemilihan kepala negara merupakan bagian dari partisipasi politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan

KPU termuat dalam pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia.

Selain itu Undang-Undang tersebut juga telah menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU RI) adalah badan yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Tanggung jawabnya termasuk memutuskan partai mana yang dapat mengikuti pemilu, mengatur pemungutan suara, dan mengumumkan hasil serta kursi yang dimenangkan di berbagai cabang pemerintahan. KPU juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi di negara kita.

Mayoritas pemilih pemula berusia antara 17 dan 21 tahun kecuali sudah menikah, dan mayoritas pemilih pertama adalah pelajar (SMA), mahasiswa, dan karyawan muda. Pemilih pemula merupakan pemilih yang mempunyai pengaruh besar dalam memperoleh suara dalam pemilu Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, menyatakan warga negara republik Indonesia pada hari pemugutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah atau pernah kawin untuk mempunyai hak untuk memilih.

Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu. Seperti dijelaskan dalam Pemilu Untuk Pemilih Pemula Modul I Komisi Pemilihan Umum (2013) kategori Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama

kali akan menggunakan hak pilihnya Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu).

Pemilih pemula merupakan sasaran yang sangat strategis karena beberapa hal, pertama, jumlah pemilih baru pada setiap pemilu cukup banyak, kedua, mereka adalah warga negara Indonesia yang baru pertama kali memilih dalam suatu pemilu, sehingga harus dibina secara cermat agar paham. proses demokrasi dan alasan ketiga adalah mereka berpotensi menjadi pemimpin masa depan. Jadi, menggali dan mengetahui pandangan mereka tentang demokrasi dapat memberikan apa yang mereka butuhkan untuk masa depan. Di Indonesia, pemilu merupakan ekspresi demokrasi yang sebenarnya dan merupakan cara rakyat mendeklarasikan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. pemilu berdasarkan pemilu Pancasila (Pemilu) biasa dikenal dengan pesta demokrasi milik negara.

Pemilu 2024 juga harus menjadi pendorong peningkatan partisipasi politik di kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih wakilnya. Pada pemilu 2019, hanya 20% dari seluruh anggota DPR terpilih adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih baru dalam politik di Indonesia masih rendah.

Kabupaten Sintang meliputi 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 390 desa. Pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 217.921,00 jiwa dengan luas wilayah 21.638,20 km²; dan sebaran penduduk 19 jiwa/km²; Kecamatan di Kabupaten Sintang terdapat 14 kecamatan yaitu: Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kalam Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Serawai, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Sintang, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Ambalau.

Desa Sungai Garong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang dengan jumlah penduduk 735.000 jiwa dengan jumlah KK 236,0 dan luas wilayah 4.764.175 hektar. Jumlah pemilih terdaftar di KPU sebanyak 525 orang, dengan kelompok usia 17-21 tahun sebanyak 38 orang. Jumlah pemilih pemula Desa Sungai Garong yang terdaftar di KPU sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2024 sebanyak 38 orang, terdiri dari 25 pemilih laki-laki dan 13 pemilih perempuan. Untuk mengetahui partisipasi pemilih pemula khususnya di Desa Sungai Garong pada pemilu tahun 2024. Penelitian ini akan didasarkan pada penelitian yang berupa Penelitian Deskriptif, dengan judul **Analisis Strategi KPU Untuk Mendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Desa Sungai Garong Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini fokus menganalisis Strategi KPU Untuk Mendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula Peserta Pemilu Tahun 2024 di Desa Sungai Garong, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas terlihat bahwa, permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sungai Garong Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang?
2. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sungai Garong, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang?
3. Bagaimana upaya dan strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mendorong Partisipasi pemilih Pemula di Desa Sungai Garong, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di penelitian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisis tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilu tahun 2024 yang di selenggarakan pada Desa Sungai Garong, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang.

2. menganalisis upaya dan strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mendorong Partisipasi pemilih Pemula di Desa Sungai Garong, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang.
3. menganalisis upaya dan strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mendorong Partisipasi pemilih Pemula di Desa Sungai Garong, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan manfaat teoritis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berfokus pada para pemilih pemula di bidang pengetahuan sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan yang menyangkut demokrasi di Indonesia

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat Desa Sungai Garong

Dapat menjadi referensi dan bahan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana strategi KPU bagi pemilih pemula dalam pemilu yang akan datang.

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Dengan adanya penelitian ini, manfaat bagi penyelenggara Pemilu terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula masa yang akan datang.

3. Bagi Lembaga STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang khususnya tentang analisis sosial politik di Kabupaten Sintang , sehingga dapat di gunakan sebagai acuan bagi mahasiswa untuk menganalisis serta memperdalam masalah terkait masalah politik yang akan datang.

4. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi mengenai teori dan memberikan inspriasi maupun pedoman untuk penelitian lebih mendalam mengenai partisipasi politik masyarakat di Desa Sungai Garong, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang.

F. Definisi Istilah

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Marrus (Bouk, Dkk: 2020: 25) memberikan pengertian tentang strategi adalah: Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana pada pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara untuk upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Memberikan pengertian tentang strategi adalah: Strategi

didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana pada pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan.

Salah satu upaya dan strategi yang dilakukan KPU yaitu dengan sosialisasi pendidikan pemilih yang merupakan proses penyampaian Informasi pemilu atau pemilihan kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu dan/atau pemilihan secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi pendidikan pemilih yang massif diharapkan masyarakat mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perilaku sebagai pemilih terkait hak, kewajiban, dan peran dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Penerapan berbagai metode sosialisasi sesuai Peraturan KPU diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait informasi Pemilu 2024. KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan di Indonesia, memiliki kewajiban mencerdaskan pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat (kpu.go.id, 14 Februari 2023).

Strategi merupakan rencana jangka panjang yang diikuti oleh tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang umumnya adalah kemenangan. Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Chandler menyebutkan bahwa strategi adalah penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang dari suatu organisasi serta penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tindakan tersebut. (Salusu, 2015:64).

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik seringkali lebih fokus pada proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan publik, seperti berpartisipasi dalam pertemuan publik, melaksanakan inisiatif dan referendum dalam konteks publik. Individu dan kelompok dalam proses menjalankan aktivitasnya. Partisipasi dalam politik adalah haknya sebagai warga negara demokrasi.

Partisipasi politik apabila dikaitkan dengan Pemilu sebagai kegiatan politik, maka partisipasi pemilih dikatakan bahwa keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara bertujuan untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu Febriantanto, (Rohman, 2023:90).

3. Pemilih Pemula

pemilih pemula antara berusia 17 hingga 29 tahun, sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Pemilih pemula menjadi salah satu target untuk dipengaruhi karena dianggap belum memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, jadi masih berada pada sikap dan pilihan politik yang belum jelas.

Pemilih pemula adalah kelompok pemilih yang baru pertama kali memiliki hak pilih atau baru pertama kali akan berpartisipasi dalam

pemilihan umum. Mereka adalah individu yang berusia sesuai dengan batasan usia pemilih yang ditetapkan oleh undang-undang dalam suatu negara. Pemilih pemula seringkali mencakup kaum muda yang baru mencapai usia pemilih dan akan mengikuti pemilihan umum pertama mereka Rachmat & Esther, 2016, (Rohman, 2023:89).

4. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrumen demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan institusi pokok pemerintah perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk melaksanakan persetujuan tadi menjadi wewenang pemerintah adalah melalui penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, terutama untuk memilih Presiden/Kepala Daerah.

Farahdiba Rahma Bachtiar (Chaerunnisa, 2019:3) mengatakan Secara Umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar

Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif.